

## Analysis of Management and Urgency of Digitizing Financial Reporting at BUMDES in the Mandalika Special Economic Zone (SEZ).

### Analisis Pengelolaan dan Urgensi Digitalisasi Pelaporan Keuangan pada BUMDES di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika

Orchidamoty Orchidamoty\*<sup>1</sup>, Eka Agustiani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Indonesia

#### Article Info

Submitted:

12/12/2022

Accepted:

29/12/2022

Approved:

06/02/2023

Published:

06/02/2023.

#### ABSTRAK

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan penggerak perekonomian desa yang tidak hanya memfokuskan perolehan keuntungan namun juga pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika menunjukkan bahwa BUMDes mengalami kendala untuk maju atau berjalan secara optimal bahkan banyak yang sudah berhenti beroperasi. Pertanyaannya, apa kendala yang dihadapi oleh BUMDes khususnya terkait pengelolaan keuangan dan bagaimana manfaat serta urgensi dari adanya digitalisasi bagi pengelola BUMDes. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. hasil studi menunjukkan bahwa kendala umum yang dihadapi oleh BUMDes adalah terkait sistem pelaporan atau pencatatan yang masih manual serta terlalu banyak variasi aplikasi yang diberikan. dalam hal ini, pengelola BUMDes juga memberikan solusi atau saran atas apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk mengelola dan menjalankan BUMDes secara maksimal.

**Kata Kunci:** BUMDes, ekonomi, dan digitalisasi.

#### ABSTRACT

BUMDes or Village Owned Enterprises are drivers of the village economy which not only focus on profit making but also community empowerment and welfare. The West Nusa Tenggara region, especially the Mandalika Special Economic Zone, shows that BUMDes experience problems progressing or running optimally and many have even stopped operating. The question is, what are the obstacles faced by BUMDes, especially related to financial management and what are the benefits and urgency of digitalization for BUMDes managers? This study uses a qualitative approach. The results of the study show that the common obstacles faced by BUMDes are related to the reporting or recording system which is still manual and too many variations of the application provided. in this case, BUMDes managers also provide solutions or suggestions for managing and running BUMDes optimally.

**Keywords:** BUMDes, economy, and digitization.

## PENDAHULUAN

Payung hukum terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Payung hukum tersebut bertujuan untuk membentuk tata Kelola pemerintahan desa yang memperhatikan aspek ekonomi dan lingkungan, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui program BUMDes (Nardin, 2019). BUMDes

atau Badan Usaha Milik Desa merupakan unit usaha desa untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa dan dikelola berdasarkan kebutuhan dan potensi desa oleh masyarakat desa itu sendiri (Sulaksana & Nuryanti, 2019) sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Usaha Milik Desa Nomor 29 tahun 2010 (Rambe et al., 2019).

BUMDes diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah desa, meningkatkan pendapatan asli desa, dengan aspek kebersamaan (Situmorang, 2020;

\* Correspondence Address

E-mail: orchidamoty287@gmail.com

Sulaksana & Nuryanti, 2019). Dana desa tersebut kemudian dapat digunakan untuk program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat desa, dan menjadikan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai aspek utama (Titioka et al., 2020 ; Junaidi et al., 2019). pemberdayaan tersebut merupakan upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan diharapkan mampu untuk tidak selamanya mengandalkan dana desa sebagai modal utama (Binti et al., 2021). Penelitian terkait yang juga membahas terkait peranan dan fungsi BUMDes bagi masyarakat lebih jauh dibahas dalam penelitian yang dilakukan oleh: Nova Ratna Sikin Rambe dkk (2020), Ratna Azis Prasetyo (2017), I Kadek Darwita dan Nyoman Redana (2018).

Program semacam BUMDes yang menjadikan desa sebagai basis pembangunan perekonomian telah lebih dahulu dilaksanakan dalam beragam program, namun besarnya intervensi pemerintah, menjadi salah satu faktor penyebab matinya semangat kemandirian masyarakat (Sulaksana & Nuryanti, 2019). Pada pembangunan tingkat desa, terdapat beragam kendala dan kelemahan yang disebabkan oleh banyak faktor meliputi permasalahan kualitas sumberdaya manusia pengelola BUMDes maupun persoalan keuangan (Prasetyo, 2017). Sehingga dalam mengatasi persoalan keuangan terutama yang terakit dengan pelaporan keuangan diperlukan adanya sistem pelaporan keuangan dan tata Kelola keuangan yang akuntabel, sustainable, emansipatif, transparan, dan kooperatif (Arista et al., 2021; Binti et al., 2021).

Penelitian terkait BUMDes telah banyak dilakukan terutama terkait bagaimana upaya yang dilakukan untuk pengembangan BUMDes, misalnya: Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Mulia di Desa Purwareja Kabupaten Lamandau (Iyan et al., 2020); Pendampingan Akuntansi Dan Keuangan BUMDes Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara (Risal & Wulandari, 2020),

Namun yang berfokus pada kendala atau hambatan yang dihadapi oleh BUMDes sehingga sulit untuk berkembang terutama di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, terutama yang merupakan bagian dari desa penyangga belum ditemukan literatur yang membahas hal tersebut. Sehingga untuk mengisi kekosongan tersebut dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk mendalami dan Menganalisis Kendala Dalam Pengelolaan Keuangan Bumdes dan Urgensi Digitalisasi Pelaporan Keuangan pada Bumdes di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah dan diharapkan mampus menjadi penggerak perekonomian desa (Ferina et al., 2020; Iyan et al., 2020) yang bergerak berdasarkan potensi dan keunggulan dari masing-masing desa (Cahyani et al., 2019; Risal & Wulandari, 2020; Safrida et al., 2020; Se & Langga, 2021), yang merupakan unit terkecil dan berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat (Anggraeni, 2016; Safrida et al., 2020) yang menjadi prioritas untuk disejahterakan, dan memiliki payung hukum yang jelas (Ridwan, 2013). BUMDes menjalankan beragam usaha yang mencakup: Jasa Keuangan, Jasa angkutan, penyaluran bahan pokok, usaha hasil tani, perikanan, agrobisnis, industri dan kerajinan rakyat, atau usaha yang serupa (Ferina et al., 2020).

Perkembangan BUMDes sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Satria & Redhani, 2020). BUMDes memiliki peran untuk membantu meningkatkan pendapatan asli desa dimana pemerintah desa berperan sebagai pengawas kegiatan BUMDes termasuk pada sistem pertanggungjawaban keuangan yang seharusnya dilakukan setiap tiga bulan sekali (Cahyani et al., 2019). Prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam pengelolaan BUMDes antara lain: kemampuan bekerjasama dengan baik (Koorperatif); memberi dukungan dan kontribusi penuh ( Pertisipatif); diperlakukan sama secara adil (Emansipatif); aktivitas yang terbuka dan diketahui masyarakat (Transparan); dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi (Akuntabel); harus dikembangkan dan dilestarikan (Sustainable) (Rahma et al., 2022; Se & Langga, 2021).

BUMDes memiliki peranan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dewi, 2014) dan keuntungannya dialokasikan dengan persentase yang berbeda beda (Anggraeni, 2016)

### **Digitalisasi Pelaporan Keuangan**

Hal paling penting dalam pengelolaan BUMDes adalah transparansi yang menunjukkan pengelolaan dan pelaporan yang baik terhadap masyarakat, pemerintah, maupun anggota BUMDes (Savitri & Diyanto, 2022). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam hal operasional, BUMDes diwajibkan untuk menyiapkan laporan berkala terkait pelaksanaan program kerja BUMDes. Laporan tersebut berbentuk laporan tahunan dan semesteran, terkait laba rugi, laporan posisi keuangan, CALK maupun kegiatan-kegiatan BUMDes selama beroperasi (Aprillianto et al., 2022).

Pada umumnya laporan yang disusun oleh pengelola BUMDes tidak sesuai dengan kaidah pedoman (Savitri & Diyanto, 2022). Aspek kearifan lokal yang ada di suatu tempat turut mempengaruhi sistem pelaporan keuangan sebuah BUMDes (Aprillianto et al., 2022). Digitalisasi pelaporan keuangan dilakukan melalui desain aplikasi dan pelatihan serta pendampingan sehingga mampu mewujudkan pelaporan yang transparan dan akuntabel (Savitri & Diyanto, 2022). Penyusunan laporan keuangan yang baik mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan untuk kebutuhan pihak internal maupun eksternal (Arista et al., 2021). Pengungkapan digitalisasi dianggap mampu menjangkau seluruh aspek masyarakat untuk diakses kapanpun dan tersusun secara sistematis (Hardianingsih et al., 2021; Mashuri & Ermaya, 2021). Digitalisasi mampu merangkul dan menjawab tantangan dalam menyongsong Indonesia Emas (Mandiri & Kusuma, 2022) termasuk dalam hal pelaporan keuangan

### **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan melakukan

*Tabel 1.1 Jenis Usaha BUMDes di KEK Mandalika*

wawancara sistematis, dan Focus Group Discussion (FGD) secara tatap muka. Informan pada kegiatan ini meliputi:

ketua dan Sekeretaris/Bendahara BUMDes terkait di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, kepala Desa terkait di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Sedangkan untuk BUMDes yang menjadi obyek penelitian meliputi: BUMDes Kuta, BUMDes Selong Belanak, BUMDes Rambitan, dan BUMDes Sejahtera Sengkol. dari hasil pertemuan tersebut diperoleh beberapa data yang kemudian kami bandingkan dengan literatur dan hasil di lapangan. Alasan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif adalah agar dapat secara fleksibel menguraikan dan mendeskripsikan pemahaman tentang kendala dan kebutuhan dari perspektif partisipan atau narasumber, yang dikomunikasikan dengan Bahasa mereka sendiri dengan spesifik dan terbuka, (Roberts, 2020).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kajian Masalah yang Dihadapi BUMDes**

Dalam menjalankan usahanyam terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BUMDes, kendala tersebut meliputi internal (Sumberdaya manusia, manajemen BUMDes) dan faktor eksternal yang terkait dengan lingkungan dan instansi terkait (Mashuri & Ermaya, 2021; Satria & Redhani, 2020). Salah satu modal utama untuk pembangunan BUMDes adalah sumber daya alam di desa (potensi desa) serta sumberdaya manusia (Ferina et al., 2020). sehingga terus dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia para pengelola BUMDes (Darwita & Redana, 2018). Namun sebelum membahas terkait kendala yang dihadapi oleh BUMDes, perlu diketahui lebih awal terkait jenis usaha yang digeluti oleh BUMDes yang tentu seharusnya disesuaikan dengan potensi dan keunggulan dari masing-masing desa. Berikut pengelompokan atau pemaparan terkait jenis usaha yang digeluti oleh BUMDes di KEK Mandalika yang menjadi obyek penelitian

No	Nama BUMDes	Lokasi BUMDes	Jenis Usaha
1	BUMDes Putri Nyale	Desa Kuta	Percetakan, Simpan Pinjam, Pedagangan (LPG), Homestay, dan Pengelolaan sampah
2	BUMDes Selong Belanak	Desa Selong Belanak	Depot air minum, penyewaan alat surfing, mini mart, simpan pinjam dan homestay
3	BUMDes Karye Muliye	Desa Rambitan	Perdagangan umum, pertanian, peternakan, dan industri tenun.
4	BUMDes Sejahtera/ Segala Anyar	Desa Sengkol	Pengelolaan sampah dan budidaya manggot

Berdasarkan temuan lapangan dan hasil wawancara, beberapa kendala yang di hadapi oleh BUMDes khususnya dalam hal pengelolaan keuangan antara lain:

#### **Sistem Pelaporan dan Pencatatan Masih Manual**

Laporan Keuangan yang terdigitalisasi dapat memberikan kemudahan bagi pengaksesnya dalam memperoleh data secara sistematis (Mashuri & Ermaya, 2021). Namun dengan sistem yang masih manual pengelola BUMDes mengeluhkan terkait tidak efektif dan efisiennya pelaporan manual terutama ketika tidak didukung oleh sumberdaya yang mumpuni.

Beberapa BUMDes menggunakan aplikasi seperti excel maupun beberapa aplikasi yang pernah disosialisasikan dalam membuat laporan keuangan, namun kurangnya pelatihan maupun pendampingan yang konsisten menyebabkan pengelola BUMDes tetap kembali memilih cara manual untuk membuat laporan keuangan mereka, yang pada dasarnya cukup panjang dan rumit, terutama apabila berurusan dengan laporan tahunan. Ketidakmampuan dalam mengoperasikan aplikasi yang lebih efisien menyebabkan para pengelola terpaksa meluangkan waktu yang lebih lama dalam menyusun laporan keuangan, bahkan tidak sesuai dengan standar pelaporan keuangan serta tidak mampu secara jelas melihat pos-pos pengeluaran mana saja yang berpengaruh secara signifikan maupun tidak, menguntungkan maupun tidak, secara lebih mendetail, sehingga mengakibatkan tidak optimalnya operasional BUMDes. Analisa Analisa laba rugi ataupun hal lain yang terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan laporan keuangan (Probowulan et al., 2021) tidak dapat dilakukan karena kendala dalam

penyusunan laporan keuangan yang efisien dan lebih mendetail. Digitalisasi pencatatan dan pelaporan keuangan akan meningkatkan efisiensi dalam penyajian laporan keuangan (Binti et al., 2021).

#### **Aplikasi yang Diberikan Sulit Dipahami**

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa, telah banyak jenis aplikasi yang diberikan kepada para pengelola BUMDes, namun ternyata hal ini juga menjadi tantangan tersendiri dikarenakan, pengelola BUMDes mengeluhkan saat disetiap pelatihan, selalu diberikan aplikasi yang berbeda-beda, sehingga sulit dipahami terutama tanpa adanya pendampingan yang berkelanjutan dan berjalan. Dalam hal ini pengelola juga mengalami kebingungan dalam mengoperasikan aplikasi terutama dalam menggabungkan seluruh unit, dan merasa bahwa aplikasi yang disosialisasikan belum terkoordinir. Sehingga pengelola BUMDes merasakan belum menemukan aplikasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan pengoperasian yang mereka miliki, terutama aplikasi yang dalam tahap uji coba seringkali error.

Sehingga dalam hal ini beberapa pengelola cenderung kembali untuk menggunakan cara-cara manual karena tidak adanya pelatihan yang khusus pada aplikasi tertentu yang memang dipilih dan terkoordinir secara baik dengan pemerintah. padahal tujuan dari adanya digitalisasi adalah untuk mempermudah tata kelola atau penyusunan laporan keuangan secara lebih sistematis dan efisien demi memperlancar pengembangan usaha BUMDes kedepannya, namun apabila tidak diiringi dengan langkah-langkah strategis implementasi digitalisasi tentu akan menghasilkan produk yang sulit diterima oleh masyarakat.

## Persepsi Masyarakat Terkait BUMDes

Pengenalan dan pemahaman terkait BUMDes masih sangat jarang dilaksanakan. Padahal BUMDes di setiap daerah memiliki produk usaha yang berbeda-beda dan perlu disosialisasikan secara maksimal mengenai tujuan, fungsi, dan jenis usaha yang dilakukan oleh masing-masing BUMDes. Pengelola BUMDes mengeluhkan banyak hal terkait persepsi masyarakat terhadap BUMDes, dimana sebagian besar menganggap bahwa Modal BUMDes sepenuhnya untuk masyarakat dan bukan untuk dikelola bersama.

Banyak kasus juga dimana masyarakat meminjam tapi tidak menyimpan dana karena menganggap dana yang digunakan sepenuhnya berasal dan terus menerus disediakan oleh desa, sehingga tidak terjadi perputaran uang dalam usaha BUMDes tersebut. Pengelola BUMDes menyampaikan bahwa masih sangat minim sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung lancarnya kegiatan BUMDes, seperti BUMDes Sejahtera/ Segala Anyar Sengkol yang mengatakan bahwa masyarakat belum diberikan edukasi tentang bagaimana cara mengelola dan memilah sampah, yang pada dasarnya memiliki prospek yang besar untuk pengembangan ekonomi masyarakat.

## Masalah Operasional dan Pemasaran Usaha

Faktor internal selanjutnya yang menjadi kendala BUMDes adalah manajerial usaha, dimana masih banyak kendala operasional terutama terkait transportasi, padahal jenis usaha seperti yang dilakukan oleh BUMDes Selong Belanak dan BUMDes Sejahtera membutuhkan dukungan transportasi yang baik untuk kemajuan usaha yang dilakukan. Kendala tersebut mengakibatkan BUMDes tidak dapat beroperasi secara maksimal dalam memenuhi dan memperluas jangkauan usahanya. Masalah dana dan kemampuan pengelolaannya menjadi dasar utama ketidakmampuan BUMDes dalam melakukan ekspansi di masyarakat, sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar seperti ini, baik yang terkait dengan kekayaan fisik maupun non fisik seperti manajemen usaha seharusnya telah dikuasai oleh pengelola BUMDes.

## SIMPULAN

Kendala yang dihadapi oleh BUMDes Putri Nyale, Selong Belanak, Sejahtera, dan BUMDes Rambitan meliputi kendala internal dan eksternal. Kendala Internal lebih mengarah pada ketersediaan dana minimnya kemampuan SDM dalam melakukan manajerial usaha yang baik mulai dari pelaporan keuangan yang sesuai standar maupun kemampuan pengoperasian aplikasi untuk digitalisasi laporan keuangan. Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi oleh BUMDes meliputi kekeliruan pandangan masyarakat terhadap BUMDes dan aplikasi digitalisasi pelaporan keuangan yang sulit dipahami. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, digitalisasi apabila tidak diringin dengan pendampingan dan sosialisasi yang konsisten terkait aplikasi atau teknologi yang digunakan, tidak akan mampu diterima dengan baik oleh target. Sehingga masyarakat menyadari akan adanya manfaat besar dari digitalisasi namun turut membutuhkan pendampingan dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan, serta aplikasi yang mudah dimengerti.

---

## Deklarasi penulis

### Kontribusi dan tanggung jawab penulis

Para penulis membuat kontribusi besar untuk konsepsi dan desain penelitian. Para penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan pembahasan hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

### Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

### Ketersediaan data dan bahan

Semua data tersedia dari penulis.

### Kepentingan yang bersaing

Para penulis menyatakan tidak ada kepentingan bersaing.

---

## REFERENSI

- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155-167.
- Aprillianto, B., Maharani, B., Sayekti, Y., & Irmadaryani, R. (2022). Menuju Tata Kelola Bumdes Yang Baik Melalui Digitalisasi Dan Konsolidasi Laporan

- Keuangan. *Jurnal Abdi Panca Marga*, 3(2), 55–60.
- Arista, D., Satyanova, V. A., Rahmawati, L. D. A., & Hapsari, A. A. (2021). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Bumdes Banyuanyar Berkarya Desa Banyuanyar Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 550–556.
- Binti, R. E., Yuliani, R., Limarjani, S., Misra, A., Hardy, E., Sari, N. A., & Yasin, M. (2021). Digitalisasi Laporan Keuangan Bumdes Kayu Bawang. *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, 1(1), 47. <https://doi.org/10.20527/ilung.v1i1.3459>
- Cahyani, E., Guspul, A., Wijayanti, R., Manajemen, P. S., & Ekonomi, F. (2019). Analisa Pengaruh Bumdes Dalam Menopang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo ( Studi Empiris Pada Bumdes Silatri Indah Desa Beran Dan Bumdes Srikandi Desa Ropoh ). *Journal Of Economic, Business And Engineering*, 1(1), 32–39.
- Darwita, I. K., & Redana, D. N. (2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah Fisip*, 9(1), 51–60.
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal Of Rural And Development*, V(1), 1–14.
- Ferina, Z. I., Hanila, S., Fitriano, Y., Susanti, N., & Soleh, A. (2020). Peningkatan Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Bumdes Desa Pulau Panggungkecamatan Talang Empat Bengkulu Tengah Zahrah. *Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 324–333.
- Hardianingsih, P., Srimindarti, C., Afifatul, J., & Haryanto, M. Y. D. (2021). Digitalisasi Publikasi Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 19(1), 132–146.
- Iyan, Mawung, A. S., & Mantikei, B. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Sumber Mulia Di Desa Purwareja Kabupaten Lamandau. *Journal Of Environment And Management*, 1(2), 103–111.
- Junaid, A., Amiruddin, Muslim, & Arham, M. (2019). Pkm Pendampingan Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Pengabdian Bina Ukhuwah*, 1, 134–142.
- Mandiri, I. M. C., & Kusuma, P. Sri Arta Jaya. (2022). Strategi Digitalisasi Ekonomi Kerakyatan. *Management And Accounting Expose*, 5(1), 11–22.
- Mashuri, A. A. S., & Ermaya, H. N. L. (2021). Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Manual Menjadi Digitalisasi Akuntansi Sederhana Pada Pelaku Umkm Di Kabupaten Serang. *Bakti Masyarakat Indonesia*, 4(1), 92–101.
- Nardin, Y. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 140–145.
- Prasetyo, R. A. (2017). Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan. *Jurnal Dialektika*, 11(1), 86–100.
- Probowulan, D., Oktavianto, H., Dk, D., & If, M. N. (2021). Urgensi Pelaporan Keuangan Digital Bumdes Amanah Desa Pondokrejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 98–103.
- Rahma, F., Mustafa, R. M., Rokhayati, H., Prihdiyanti, A. S., Soedirman, U. J., Soedirman, U. J., Soedirman, U. J., Wilayah, K., & Jenderal, D. (2022). Analisis Potensi Dan Kendala Pada Bumdes Unit Usaha Bidang Pengelolaan Air Bersih Serta Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa ( Pad ) Dan Kesejahteraan Masyarakat Di. In *Mid Year National Conference* (Pp. 676–692).
- Rambe, R. C., Prihanto, P. H., & Hardiani, H. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 8(1), 54–67. <https://doi.org/10.22437/jels.v8i1.11967>
- Ridwan, Z. (2013). Payung Hukum Pembentukan Bumdes. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 355–371.
- Risal, & Wulandari, R. (2020). Pendampingan Akuntansi Dan Keuangan Bumdes Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. *Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 49–57.
- Roberts, R. E. (2020). Qualitative Interview Questions: Guidance For Novice Researchers. In *Qualitative Report* (Vol. 25, Issue 9). <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2020.4640>
- Safrida, E., Affandi, I., Bahri, N., Medan, P. N., Medan, P. N., Medan, P. N., Medan, P. N., Medan, P. N., & Sagala, D. D. (2020). Upaya Maksimalisasi Potensi Desa Melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Di Desa Dolok Sagala. *Pengabdian Masyarakat*, 1(1).

- Satria, B. A., & Redhani, R. (2020). Studi Tematik Undang-Undang Desa : Pengembangan Bumdes Di Kabupaten Bangka Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 87–95.  
<https://doi.org/10.31289/Publika.V8i2.4153>
- Savitri, E., & Diyanto, V. (2022). Pendampingan Pelaporan Keuangan Bumdes Berbasis Web Facilitation Of Web-Base Bumdes Financial Reporting. *Journal Of Community Engagement*, 2(6), 268–277.
- Se, H., & Langga, L. (2021). Peranan Bumdes Dalam Mendukung Perekonomian Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Watusipi Kecamatan Ende Kabupaten Ende. *Resona Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 75–86.
- Situmorang, D. M. (2020). Pelatihan Dan Penerapan Sistem Akuntansi Pada. *Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 58–66.
- Sulaksana, J., & Nuryanti, I. (2019). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kasus Di Bumdes Mitra Sejahtera Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (Jepa)*, 3(2), 348–359.
- Titioka, B. M., Huliselan, M., Sanduan, A., Ralahallo, F. N., & Siahainenia, A. J. . (2020). Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Kabupaten Kepulauan Aru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi)*, 03(01), 197–216.